

LOBI DAN ADVOKASI UNTUK MELAWAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA

Lobbying and Advocacy Against Human Trafficking Crimes

Oleh : Gabriel Goa
Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia
Zero Human Trafficking Network

By: Gabriel Goa
Chairman of the Board of Trustees, PADMA Indonesia Zero Human Trafficking
Network

**DISAMPAIKAN DALAM WORKSHOP ON LOBBY AND ADVOCACY ASIA
PACIFIC WOMEN OF FAITH NETWORK (APWoFN) of ASIAN CONFERENCE OF
RELIGIONS FOR PEACE (ACRP)/
RELIGIONS FOR PEACE ASIA (RfP-Asia) 24-26 SEPTEMBER 2024 (ONLINE)**

Presented in the Workshop on Lobby and Advocacy Asia Pacific Women of Faith Network
(APWoFN) of Asian Conference of Religions for Peace (ACRP)/Religions for Peace Asia
(RfP-Asia) 24-26 September 2024 (Online)

LOBI DAN ADVOKASI UNTUK MELAWAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA

Lobbying and Advocacy Against Human Trafficking Crimes



ASPIRASI

Kardinal Suharyo Singgung Human Trafficking dalam Surat Gembala Prapaskah 2023, PADMA Indonesia: Negara Harus Dengar Seruan Kemanusiaan

"Cardinal Suharyo Mentions Human Trafficking in the 2023 Lenten Pastoral Letter, PADMA Indonesia: The State Must Hear the Call for Humanity."

This emphasizes the Cardinal's remarks on human trafficking and PADMA Indonesia's appeal for the government to respond to humanitarian calls.

Surat Gembala Prapaskah 2023 Bapa Kardinal Suharyo tentang Perdagangan Manusia adalah Kejahatan Luarbiasa dan Dosa Berat membuat pejuang kemanusiaan melawan mafiosi Perdagangan Manusia semakin berani dalam aksi nyata Prapaskah membela Korban Perdagangan Manusia voice of the voiceless. Keberpihakan Bapa Kardinal belarasa bersama Korban Perdagangan Manusia untuk berani ungkap dan usut tuntas jaringan Mafiosi Perdagangan Manusia sangat kami hargai. Kami sangat mengharapkan Kardinal Suharyo bisa membuka mata dan nurani Tokoh-tokoh Agama di Indonesia bersama-sama belarasa membela Korban dan bertindak nyata dengan melakukan aksi nyata.

The 2023 Lenten Pastoral Letter from Cardinal Suharyo on Human Trafficking as an Extraordinary Crime and a Grave Sin has encouraged humanitarian fighters to bravely oppose the mafiosi involved in human trafficking with concrete actions during Lent, defending the victims – the voice of the voiceless. Cardinal Suharyo's solidarity with the victims of human trafficking, and his courage to expose and thoroughly investigate the mafiosi networks, is greatly appreciated. We deeply hope that Cardinal Suharyo can open the eyes and consciences of religious leaders in Indonesia to join in solidarity, defending the victims, and taking concrete action."

I. TANTANGAN



Romo Paschal (ketiga dari kanan) saat berada di Kantor Komnas HAM di Jakarta. KatongNTT

Korban Kriminalisasi Hukum dan Ham Victims of Legal and Human Rights Criminalization



Auxiliary Bishop David O'Connell of Los Angeles at Mass at the Southern California Renewal Communities convention on Aug. 31, 2018. | Courtesy of Southern California Renewal Communities

Pejuang Kemanusiaan ditembak mati Humanitarian fighter shot dead

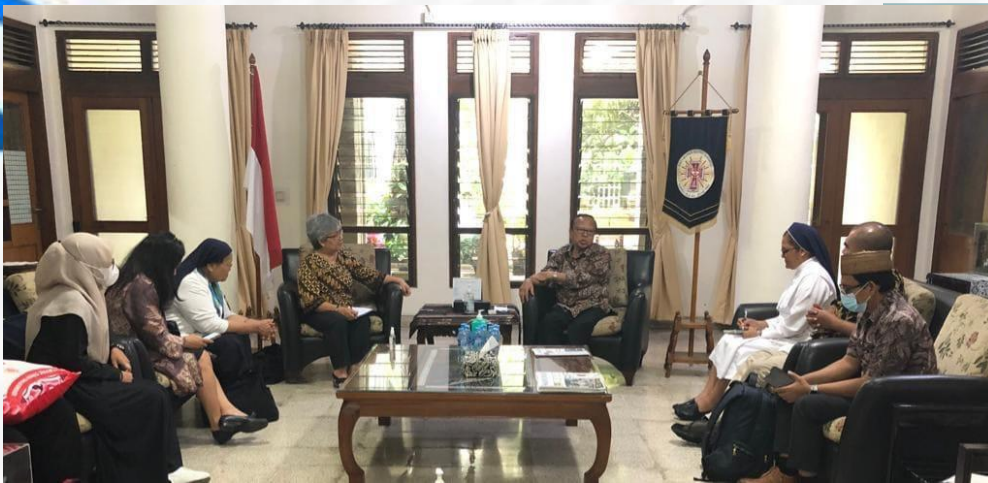
- Belum optimalnya Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan TPPO di level nasional dan belum terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantong-kantong Perdagangan Manusia.
- Kongkalikong Mafia Perdagangan Manusia dengan Aparat penegak Hukum (APH), Aparat Keamanan (Darat, Laut, dan Udara), Pemerintah dan Legislatif.
- Iming-iming lowongan pekerjaan dengan gaji yang fantastis serta proses pemberangkatan yang cepat non prosedural.
- Uang siri pinang kepada keluarga, Uang Sumbangan untuk lembaga-lembaga agama dan lembaga sosial serta tanda terima kasih kepada pemuka agama, pemuka masyarakat dan tokoh adat.
- Kriminalisasi Hukum dan Diskriminasi Ham bahkan terancam dibunuh atau ditembak mati terhadap Pejuang Kemanusiaan yang mau membongkar tuntas Jaringan Mafia Perdagangan Manusia baik Nasional maupun Internasional.
- Belum maksimalnya Jejaring Anti Perdagangan Manusia karena kendala SDM dan Dana Gerakan untuk Pencegahan, Penanganan, Pendampingan Psikologis, Pendampingan Rohani, Pendampingan Hukum, Pendampingan Kesehatan, Program Integrasi dan Reintegrasi untuk Korban Perdagangan manusia.
- Belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang rentan menjadi Korban Perdagangan Manusia.
- Belum tersedianya Rumah Aman untuk Korban Perdagangan Manusia di kantong-kantong Perdagangan Manusia yang memenuhi standar PBB.
- Belum adanya kerelaan berkorban dan empati dari Pemerintah dan Pemuka Agama untuk berbela rasa sekaligus menyelamatkan korban Perdagangan Manusia dari Jaringan Mafia Perdagangan Manusia baik Nasional maupun Internasional.
- Belum Optimalnya Kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, CSO dan PERS) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia.

- The lack of optimization of the Task Force for the Prevention and Handling of Human Trafficking (TPPO) at the national level and the absence of Task Forces in provinces, regencies, and cities where human trafficking is prevalent.
- Collusion between Human Trafficking Mafias and law enforcement officers (APH), security forces (land, sea, and air), government, and legislative bodies.
- Promises of fantastic salaries and quick, non-procedural job departures.
- Financial incentives given to families, donations to religious and social institutions, as well as tokens of gratitude to religious leaders, community leaders, and traditional figures.
- Legal criminalization and human rights discrimination, with threats of being killed or shot for humanitarian fighters who seek to expose and dismantle national and international human trafficking networks.
- The anti-human trafficking network has not yet reached its full potential due to limitations in human resources and funding for activities related to prevention, handling, psychological counseling, spiritual counseling, legal support, health assistance, and reintegration programs for trafficking victims.
- The lack of available Vocational Training Centers (BLK) and Integrated One-Stop Services (LTSA) for prospective Indonesian migrant workers vulnerable to human trafficking.
- The absence of secure shelters for human trafficking victims in trafficking hotspots that meet UN standards.
- The lack of sacrifice and empathy from the government and religious leaders to empathize and save trafficking victims from national and international trafficking networks.
- The Pentahelix collaboration (government, community, academics, CSOs, and media) in preventing and handling human trafficking in Indonesia has not yet been optimized.

II. LOBI DAN ADVOKASI Lobbying and Advocacy







- ❖ Mendukung Kardinal dan Tokoh-tokoh lintas Agama serta lintas iman melobi Presiden Jokowi perintahkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera **tangkap** dan **proses hukum Oknum-oknum Pejabat** yang menjadi beking mafiosi Perdagangan Manusia dan melakukan kriminalisasi terhadap Tokoh-Tokoh Agama dan Penggiat Anti Perdagangan Manusia yang sedang berjuang melawan Perdagangan Manusia.
- ❖ Mendukung Kardinal, Tokoh-tokoh Agama dan Lintas Iman serta Penggiat Anti Perdagangan Manusia melobi Presiden Jokowi segera membentuk **Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang(BNP TPPO)** dan segera menerbitkan **PP Justice Collaborator TPPO**.
- ❖ Mendukung Kardinal dan Tokoh-tokoh Agama dan Lintas Iman bersama Penggiat Anti Perdagangan Manusia mendesak Pemerintah dan DPR RI segera **merevisi UU No.21 Tahun 2007** tentang **Tindak Pidana Perdagangan Orang**.

- ❖ Supporting Cardinal and religious leaders from various faiths to lobby President Jokowi to order the Task Force for the Prevention and Handling of Human Trafficking Crimes to immediately arrest and prosecute officials who protect human trafficking mafiosi and criminalize religious leaders and anti-human trafficking activists who are fighting against human trafficking.
- ❖ Supporting the Cardinal, religious leaders, interfaith leaders, and anti-human trafficking activists in lobbying President Jokowi to immediately establish the National Agency for the Eradication of Human Trafficking Crimes (BNP TPPO) and promptly issue a Government Regulation on Justice Collaborators for Human Trafficking Crimes.
- ❖ Supporting the Cardinal, religious leaders, interfaith leaders, and anti-human trafficking activists in urging the Government and the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to immediately revise Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking Crimes.



- ❖ **Membangun Balai Latihan Kerja (BLK)** mempersiapkan Kompetensi dan Kapasitas Calon Pekerja Migran (seperti BLK Susteran SSPS di Pada, Lembata NTT) serta bekerja sama dengan Pemerintah membangun **Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)** bagi Calon Pekerja Migran agar tidak terjebak bujuk rayu jaringan Mafia Perdagangan Manusia.
- ❖ **Building Vocational Training Centers (BLK)** to prepare the skills and capacities of prospective migrant workers (such as the BLK run by the SSPS Sisters in Pada, Lembata, NTT) and collaborating with the government to establish **Integrated One-Stop Services (LTSA)** for prospective migrant workers to prevent them from being lured into human trafficking networks.



- ❖ **Menyiapkan Rumah Aman untuk Korban Perdagangan Manusia di Kantong-kantong Perdagangan Manusia yang memenuhi standar PBB seperti RUMAH AMAN GEMBALA BAIK dan Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU).**

Preparing safe houses for victims of human trafficking in trafficking hotspots that meet UN standards, such as the Good Shepherd Safe House and the Kasih Yang Utama Foundation (YKYU).



Stop Selling People